

Agenda Dakwah dalam Perspektif Pemikiran Islam

Ariendonika

Pendahuluan

Salah satu dasar normatif dakwah dalam al-Qur'an disebutkan pada surat Ali Imran (3) ayat 110 :

"Kamu adalah ummat terbaik (*khairu ummah*), yang pernah dimunculkan (ke pentas sejarah) untuk umat manusia, (supaya) kamu menyuruh dengan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, serta beriman kepada Allah"

Khairu Ummah, sebagai tujuan akhir dakwah Islam pada ayat ini, memiliki tiga kualitas, yakni menegakkan amar ma'ruf (membangun sistem kehidupan produktif), mencegah dari perbuatan munkar (memberantas segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan), serta beriman (berserah diri secara total) hanya kepada Allah semata. Amar ma'ruf dan naahi munkar serta berserah diri kepada Allah, yang menjadi kualitas *khairu ummah* tersebut, harus terlaksana secara sistemik dalam seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, baik dalam kehidupan individual maupun dalam kehidupan sosial.

Gerak pelaksanaan amar ma'ruf naahi munkar yang didasarkan pada keimanan kepada Allah itu akan terlaksana bila dilakukan hanya dalam rangka penyerahan diri kepadanya.¹ Karena itu, setiap perbuatan secara formal harus dimulai dengan menyebut nama Allah yang menjadi sumber dari keberkatan perbuatan itu, sehingga apa saja yang dikerjakan menjadi lebih produktif.

Agaknya ini yang mendorong Hodgson, seorang orientalis yang begitu apresiatif terhadap Islam, memberikan komentar tentang ayat tersebut dengan mengatakan bahwa orang-orang Islam telah mengambil ramalan ini dengan serius, sampai-sampai mencoba untuk membentuk sejarah seluruh

¹Lihat, Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. I, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992, h. 57.



dunia sesuai dengan isi ramalan itu.² Dan ini pula yang menjadi semangat dakwah Islam. Lebih lanjut Hodgson mengatakan, segera setelah kepercayaan dibangun, kaum muslimin berhasil mewujudkan sebuah bentuk masyarakat baru, yang kesemuanya memberikan kesan islami.³

Dengan fondasi seperti itu, Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah belasan abad lalu. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Madinah pimpinan Rasulullah itu adalah masyarakat plural, multi etnis, bahkan multi agama. Masyarakat tersebut dipersatukan oleh Nabi dengan satu *Common platform, Mitsaq Madinah* atau Piagam Madinah.⁴ Dalam piagam itu disebutkan dasar-dasar masyarakat egaliter dan partisipatif dengan kewajiban pertahanan keamanan bersama, jaminan atas kebebasan beragama serta ditegakkannya musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang menampung seluruh aspirasi masyarakat.

Tradisi kehidupan masyarakat egaliter dan partisipatif tersebut dibangun oleh Nabi dengan mengembangkan keberanian memunculkan pendapat banding terhadap kebijakan-kebijakan Nabi yang bukan berasal dari wahyu. Bila kebijakan itu berdasar dari wahyu, mereka berkata *sami'na wa atha'na*. Tetapi, jika kebijakan tersebut berasal dari pemikiran Nabi sendiri, mereka tanpa sungkan mengkritik pendapat tersebut. Tanpa beban apapun Nabi menerima pendapat banding masyarakat itu, dan kemudian menjadikannya sebagai kebijakan baru.

Bangsa Indonesia yang berada di tengah terpaan krisis, dan sedang berupaya mengatasinya dengan semangat reformasi sangat memerlukan model masyarakat yang benar-benar kokoh secara intelektual dan moral. Maka, model masyarakat Madinah tersebut merupakan alternatif yang patut dipertimbangkan.

Namun, satu hal yang tidak perlu dipersoalkan lagi adalah bahwa corak masyarakat Madinah yang egaliter dan partisipatif tersebut tidak dapat

² Marshal G.S. Hodgson, *The Ventur of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, The University of Chicago Press, 1974, h. 71.

³ *Ibid.*

⁴ Secara lengkap teks *Mitsaq Madinah* tersebut dapat dilihat pada Muhammad Husein Haikal, *Hayatu Muhammad*, Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, Kairo, 1965, h. 225-227. Terjemah lengkapnya dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dalam Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Cet. I, UI-Press, Jakarta, 1995, h. 47-57.



disalin secara formal begitu saja dalam bentuk aslinya, seperti belasan abad yang lalu. Tindakan yang paling cerdas untuk dilakukan adalah menangkap nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat Madinah tersebut, dan kemudian merumuskannya menjadi rumusan-rumusan yang kongkrit dan jelas serta dapat dinyatakan dilaksanakan. Hal itu hanya mungkin dilakukan melalui upaya *rethinking*, meminjam istilah Muhammad Arkoun, atau dengan jalan *reconstruction*, sebagai yang dikatakan Muhammad Iqbal, ke dalam konteks keindonesiaan. Hal itu pula yang menjadi agenda dakwah dalam perspektif pemikiran Islam untuk mewujudkan Indonesia Baru.

Dasar-Dasar Pemikiran Dakwah

Upaya *rethinking* ataupun *reconstruction* tersebut dapat dipahami sebagai dasar-dasar pemikiran dakwah. Hal ini yang dimaksud dengan ungkapan Allah dalam al-Qur'an, *yughayyiru ma bi anfusihim* (mengubah apa yang ada dalam diri mereka) kaum muslimin, sebagai yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Ra'd (13) ayat 11 :

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri”

Ia adalah suatu wujud batiniah yang berperan membentuk, mempertahankan, dan mengembangkan apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri.⁵

Secara akademik, tugas *rethinking* atau *reconstruction* menjadi tanggung jawab pemikir dan ideolog dakwah dalam memanfaatkan ilmu Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam, yang secara populer dikenal dengan nama Pemikiran Islam. Bidang studi pemikiran Islam ini mencakup ilmu kalam, falsafat Islam, dan tasawuf. Ilmu kalam dan falsafat Islam menyandarkan argumentasinya pada penggunaan rasio yang disebut akal (*al-'aql*), sedangkan tasawuf meletakkan dasar pengenalannya dengan mempergunakan rasa yang disebut kalbu (*al-qalb*). Keduanya, akal dan kalbu ini, menurut pemikiran Islam adalah potensi yang dimiliki oleh manusia yang harus dipergunakan secara simultan. Kedua potensi ini, menurut filsuf Islam, Ibn Sina, berkembang dalam diri manusia dengan mengambil tempat, akal berpusat di kepala dan kalbu berpusat di dada, yang keduanya harus berjalani-berkelindan secara sinergi.

Itu sebabnya, menurut pemikiran Islam, suatu keputusan yang diambil oleh seorang dewasa, yang sudah akil baligh, haruslah

⁵Nurcholish Madjid, *op. cit.*, h. 41.



mempergunakan pertimbangan akal dan kalbunya secara bersamaan, agar keputusan-keputusan yang diambilnya, bukan saja berdimensi rasional praktis, tetapi juga bernuansa moral dan etis. Manakala kedua potensi itu diberlakukan secara terpisah, maka akan menimbulkan akibat lahirnya perbuatan yang secara rasional pragmatis, kelihatan baik dan bermanfaat, tetapi secara moral dan etis, buruk dan tercela. Implikasi lebih lanjut dari model pendekatan yang memisahkan potensi akal dan kalbu, dapat dilihat pada betapa sulitnya membuktikan tindak pidana korupsi dan berbagai manipulasi lainnya secara legal formal, sementara rasa keadilan dan hati nurani masyarakat dapat melihatnya.

Di masa klasik Islam, kedua potensi tersebut dipergunakan secara simultan, sehingga hasil-hasil pemikirannya tidak hanya diletakkan pada pertimbangan rasionalitas dan pragmatis semata, tetapi juga pada waktu yang bersamaan pertimbangan kalbu ikut dimainkan.

Pengintegrasian akal dan kalbu dalam pemikiran Islam tersebut sejalan dengan petunjuk al-Qur'an. Seperti diketahui, al-Qur'an di samping berbicara kepada akal juga mengetuk kalbu manusia. Kepada akal al-Qur'an memberi perintah untuk mempergunakan daya nalar secara optimal. Perintah tersebut, selain melalui ayat-ayat kosmos, juga melalui ajaran-ajaran yang menyuruh, memperhatikan, dan memperbandingkan penciptaan alam semesta. Bahkan, al-Qur'an memberi kecaman terhadap orang yang mengikuti sesuatu hanya berdasarkan tradisi nenek moyang semata, tanpa pertimbangan akalnya. Hal ini yang membuat salah seorang penulis Perancis, Edward Montet, berkesimpulan bahwa Islam adalah agama yang pada dasarnya rasionalistis dalam arti yang seluas-luasnya dan rasionalistis dalam arti sistem yang berdasarkan prinsip-prinsip yang ditunjang oleh rasio.⁶

Sementara kepada kalbu al-Qur'an berbicara, selain melalui ibadah dan latihan spritual juga melalui ajaran-ajaran moral yang terdapat dalam sunnah Rasulullah. Ibadah yang berarti mendekatkan diri kepada Allah membersitkan pemahaman bahwa Allah adalah Eksistensi Yang Maha Suci yang harus didekati oleh manusia, bukan ditakuti. Ia Dzat Yang Maha Rahman dan Rahim. Pemikiran tersebut didasarkan pada filosofi Yang Maha Suci hanya bisa didekati oleh yang suci. Yang kotor tidak bisa mendekati Yang Maha Suci itu. Maka, ibadah dalam pemikiran Islam baru

⁶Lihat, Harun Nasution, *Islam Rasional*, Cet. I, Mizan, Bandung, 1995, h. 38.



bermakna jika yang melaksanakan ibadah tersebut dapat mempersuci hati nuraninya. Kesucian hati nurani dimanifestasikan melalui tingkah laku yang terpuji.

Corak ajaran seperti itulah yang mendorong Torh Andre, seorang penulis Barat, mengatakan bahwa ajaran yang dibawa al-Qur'an mempunyai corak sosial yang jelas. Yang terpenting diantaranya adalah kemurahan hati serta kesediaan menolong orang lain, serta hormat dan berterima kasih kepada orang tua, sikap damai, tidak kikir, tidak bersumpah palsu, tidak tuli dan buta terhadap kritik-kritik untuk perbaikan, menjadi teladan yang baik bagi manusia dan cinta pada sesama.⁷

Dengan begitu, pertanyaan besar bangsa kita saat ini dan ke depan adalah bagaimana melepaskan diri dari berbagai krisis yang membelenggu. Apakah itu dalam bentuk krisis ekonomi dan moneter, krisis politik dan kekuasaan, krisis sosial dan kebudayaan, krisis moral, bahkan krisis kepercayaan.

Dalam kaitan ini diperlukan kerja serius, duduk secara tenang, memeras daya pikir dan menajamkan hati nurani. Setelah secara nasional bangsa kita dengan gegap gempita melakukan reformasi terhadap segala bentuk kebobrokan dan penyelewengan, sebagai aktivitas nahyi munkar, kini tiba saatnya merenda langkah-langkah sistematis ke depan, sebagai aktivitas amar ma'ruf. Bola salju reformasi akan terus menggelinding, menggilas budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Kerja hiruk pikuk heroisme demonstrasi yang bernuansa nahyi munkar dengan turun ke jalan atau bersorak-sorak ke berbagai kantor sudah waktunya diteruskan dengan upaya *rethinking* atau *reconstruction*, yang bernuansa amar ma'ruf. Karena upaya merumuskan langkah kongkrit bagi melepaskan bangsa dari keterpurukan hanya bisa dilakukan melalui pemikiran sistematis dan berencana, yang kemudian pada gilirannya diayunkan ke masa depan memasuki Indonesia Baru.

Indonesia Baru : Peluang dan Tantangan Dakwah

Wacana diskursus kemasyarakatan kita pada era reformasi ini adalah munculnya istilah Masyarakat Madani (*Civil Society*), sebuah tatatan masyarakat yang hendak diperjuangkan pula oleh dakwah Islam. Tema Masyarakat Madani dimunculkan untuk mendiskripsikan tuntutan

⁷*Ibid.*



masyarakat agar bisa ke luar dari dominasi kekuasaan negara yang sangat berlebihan.

Masyarakat Madani, pertama-tama adalah masyarakat berperadaban, yakni masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis dengan landasan taqwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada ajaran-Nya. Ketakwaan kepada Allah, bersikap adil, terbuka, dan demokratis itu adalah manifestasi dari ajaran Islam yang mengintegrasikan dua aspek, yakni *hablum min Allah*, hubungan vertikal dengan Allah, dan *hablum min al-nas*, hubungan horizontal dengan sesama manusia.⁸ Hubungan vertikal dengan Allah yang dilakukan secara tulus, sejati dan dengan penuh keikhlasan, akan melahirkan semangat perikemanusiaan dan perikeadilan dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Semangat perikemanusiaan seperti itu secara kongkrit termanifestasi dalam berbagai bentuk komunikasi dan dialog yang penuh dengan *akhlakul karimah* (budi pekerti luhur).⁹ Karena, dalam pandangan al-Qur'an, orang yang tidak memelihara *hablum min Allah* dan *hablum min al-nas*-nya, di manapun dia berada, akan ditimpa oleh kehinaan dalam peradaban. Firman Allah dalam surat Ali Imran (3) ayat 112 :

“Ditimpakan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali bila memelihara hubungan dengan Allah serta memelihara pula hubungan dengan manusia”

Bertolak dari pandangan ini jelas bahwa Masyarakat Madani harus ditegakkan di atas landasan keadilan. Dalam dakwah Islam, agar keadilan tersebut berjalan dengan kokoh, maka supremasi hukum mesti berdisi secara kokoh pula. Menegakkan hukum adalah amanah Allah, yang diperintahkan untuk dilaksanakan kepada yang berhak. Agar keadilan berjalan dengan baik, maka hukum harus terlaksana secara tegas tanpa memandang siapa yang akan terkena akibatnya.¹⁰ Sikap sungkan dan *ewuh pakewuh* (istilah bahasa Jawa) dalam penerapan hukum akan menggerogoti sendi-sendi keadilan itu sendiri, dan pada gilirannya akan meruntuhkan kewibawaan negara dan pemerintah serta akan menghancurkan kekuatan masyarakat.

⁸Lihat, Nurcholish Madjid, “Memberdayakan Masyarakat Menuju Negeri yang Adil, Terbuka, dan Demokratis”, Pidato Sambutan Peringatan Ulang Tahun Ke-10 Yayasan Wakaf Paramadina, November 1996, h. 6.

⁹*Ibid.*, h. 7.

¹⁰*Ibid.*, h. 9.



Sejarah kemanusiaan mengajarkan kepada kita bahwa penegakkan dan pelanggaran hukum adalah sesuatu kondisi yang faktual. Ia merupakan manifestasi dari kebaikan dan kejahatan, sesuatu yang eksis dalam sejarah umat manusia. Maka, dalam upaya mewujudkan keadilan dan supremasi hukum tersebut diperlukan tatanan hidup kolektif yang memberi peluang kepada adanya pengawasan sosial. Pengawasan itu sendiri tidak mungkin dapat terlaksana dalam sistem masyarakat yang tertutup. Oleh sebab itu, masyarakat berperadaban hanya bisa terwujud dengan baik dalam semangat keterbukaan yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

Masyarakat yang dihiasi semangat keterbukaan dan kebebasan itu memerlukan penyangga yang kokoh, agar semangat tersebut tidak terjerumus ke dalam tindak anarki. Tindak anarki mempunyai kecenderungan untuk memaksakan kehendak sendiri tanpa pernah mendengarkan aspirasi orang lain. Di sini diperlukan musyawarah. Musyawarah merupakan sistem yang dibangun Nabi dalam masyarakat Madinah ketika menghadapi masalah-masalah bersama.

Secara esensial, musyawarah baru berjalan jika pihak-pihak yang bermusyawarah mundur selangkah dari pendiriannya. Sikap mundur selangkah dari pendirian tersebut mengandung arti membuka ruang kosong di tengah-tengah untuk dipergunakan masing-masing pihak melakukan berbagai improvisasi mencari titik temu. Kerelaan mundur selangkah itu hanya bisa diwujudkan jika ada kesadaran untuk tidak memutlakkan pendapat sendiri, karena memutlakkan pendapat sendiri menurut al-Qur'an berarti telah membangun *thaghut* atau tiran di dalam diri, dengan menjadikan *al-hawa* sebagai Tuhan dan itu adalah perbuatan syirik.

Hal tersebut merupakan esensi dari masyarakat yang demokratis, yakni masyarakat yang mempunyai sikap kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selamanya benar. Tidak ada suatu jawaban yang selamanya benar atas suatu masalah. Dari sini muncul sikap menghargai sesama anggota masyarakat, betapapun seorang individu atau kelompok berbeda dari diri dan kelompok sendiri.¹¹

Oleh sebab itu, dalam dakwah Islam, setiap orang atau kelompok masyarakat senantiasa menghindarkan diri dari kebiasaan menghujat, melecehkan orang atau kelompok lain, sebab bisa jadi mereka yang dihujat

¹¹*Ibid.*, h. 14.



dan dilecehkan itu lebih baik daripada mereka yang menghujat dan melecehkan. Hal ini ditegaskan Allah dalam firmanNya surat Al-Hujurat (49) ayat 11 :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah segolongan kamu memandang enteng pada segolongan lainnya, kalau-kalau golongan yang dipandang enteng itu lebih baik dari golongan yang memandang enteng. Jangan pula segolongan wanita memandang enteng golongan wanita yang lainnya, kalau-kalau wanita yang dipandang enteng itu lebih baik dari wanita yang memandang enteng. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan kefasiqan sesudah beriman, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”

Suatu realitas sosial dan kultural bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, bukan negara Islam. Sebab itu, secara kultural dan sosiologis pula, keislaman bangsa Indonesia *inheren* dengan penamaan predikat nasional dari Indonesia itu sendiri. Jika dirujuk satu persatu representasi dari predikat nasional tersebut, maka yang tertunjuk secara mayoritas adalah warga negara muslim. Namun, satu hal yang harus dipahami dengan jernih terlebih dahulu adalah bahwa keislaman bangsa Indonesia tidaklah harus dipertentangkan dengan ide negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Dalam koridor Pancasila, nilai-nilai Islam dapat ditegakkan. Sebab, Pancasila adalah “Ideologi Bersama” (*common platform*) yang dari sudut penglihatan kaum muslimin Indonesia merupakan prinsip yang menjadi “titik pertemuan dan persamaan” antara warga negara muslim Indonesia dengan warga negara non-muslim untuk mendukung Republik Indonesia.¹²

Sejalan dengan pikiran ini, konsekwensi logisnya adalah kaum muslim Indonesia dengan ajaran Islamnya adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan bagi tegaknya masyarakat Indonesia Baru yang berperadaban itu. Semuanya menjadi harapan dan tantangan dakwah Islam.

Kontribusi Dakwah Menuju Indonesia Baru

Dalam usaha memberi substansi pada pengembangan dakwah, umat Islam mempunyai kewajiban menyumbangkan kontribusi sebesar-

¹²Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin*, h. 412.



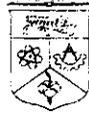
besarnya di tengah masyarakat yang sedang memasuki millenium ketiga. Dalam kaitan ini, dakwah sudah sepatutnya mengarahkan kebijakan strategisnya pada langkah-langkah berikut :

Pertama, merumuskan pemahaman sistemik ajaran Islam dalam pemikiran setiap individu masyarakat muslim. Pemahaman sistemik itu dapat dibangun melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam secara holistik dan komprehensif, yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalah. Selama ini, pemahaman tentang Islam ditangkap secara parsial dan terpecah-pecah serta tidak utuh.

Secara sistemik, keempat dimensi ajaran Islam tersebut seharusnya merupakan kesatuan dan kebulatan utuh, yang terpisahkan hanya dalam tataran diskursus akademik, bukan dalam tataran praktisnya. Oleh sebab itu, adalah suatu kezaliman jika seseorang berbuat semata-mata hanya atas pertimbangan halal dan haram, tanpa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, atau tanpa melirik sama sekali mana yang terpuji dan mana yang tercela.

Betapa terperangahnya kita sebagai bangsa dan sekaligus sebagai ummat, di saat puncak kuantitas jamaah haji yang relatif selalu melampaui kuota, dan perkembangan yang begitu pesat jumlah masjid dan majlis ta'lim, menjamurnya studi keagamaan di mana-mana, tetapi pada saat yang sama kita diterpa oleh berbagai krisis *anomali*. Masyarakat menjadi sangat beringas, tidak lagi mengindahkan nilai-nilai moral, menjarah dan merampok tanpa rasa risih. Seakan-akan bangunan kesadaran keislaman yang sudah sekian lama ditegakkan bagai rumah pasir yang disapu ombak di tepi pantai.

Adalah suatu kenyataan bahwa tema-tema dakwah selama ini dikemas hanya dalam pendekatan yang parsial, tidak menyeluruh, dan sistemik. Hal ini akan berakibat timbulnya pemahaman keagamaan yang tidak mampu membangun kaitan dan sinergi antara akidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalah. Akidah ummat memang terlihat sudah bertauhid, tetapi akhlaknya belum mencerminkan akhlak Islam. Ibadah ummat memang sudah taat dan tertib, tetapi mu'amalahnya belum mengindahkan prinsip-prinsip mu'amalah yang diajarkan oleh Islam. Ekonominya masih dihiasi keinginan cepat kaya melalui jalan pintas dan dengan cara-cara yang terlaknat; politiknya masih menghalalkan segala cara demi tujuan dan sering lebih mendahulukan kepentingan partai daripada kepentingan kesatuan ummat; kebudayaan dan sikap hidupnya masih digelantungi oleh pandangan hidup hedonistik, materialistik, dan sekularistik.



Secara sistemik, dimensi-dimensi ajaran Islam (aqidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalah) tersebut harus terjalin dengan kuat dan harmonis. Keempat dimensi Islam itu seyogyanya termanifestasi di setiap tataran kehidupan muslim, baik secara individual maupun secara sosial. Keberagamaan formal dan verbal memang diperlukan pada tingkat permulaan. Karena bagaimanapun, formalitas sebagai seorang muslim perlu dideklarasikan kepada siapa saja. Namun, kita tidak boleh berhenti pada deklarasi formalitas semata atau stagnasi pada verbalitas saja. Keislaman seseorang atau kelompok masyarakat secara kualitatif harus terus menerus meningkat, dari formalitas dan verbalitas, berkembang menuju substansialitas dan esensialitas dalam kerangka amar ma'ruf nahyi munkar menuju pemberdayaan masyarakat secara material, rasional, dan spritual.

Kedua, mempertimbangkan kembali ajaran-ajaran dasar dan warisan intelektual Islam yang pernah ada dalam berbagai aspeknya, sehingga jelas terpahami, mana ajaran yang mutlak atau absolut dan mana ajaran yang relatif atau nisbi. Berdasarkan kajian historis dan filosofis, dalam Islam terdapat dua kelompok ajaran, yakni ajaran yang bersifat mutlak atau absolut dan ajaran yang bersifat relatif atau nisbi. Ajaran yang bersifat mutlak atau absolut adalah ajaran yang tidak boleh berubah dan tidak dapat diubah. Ajaran kelompok ini berlaku secara pasti, tidak dapat diganggu gugat lagi. Keraguan terhadap ajaran mutlak atau absolut ini merupakan degradasi terhadap ajaran Islam itu sendiri. Ajaran tersebut secara tekstual termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ajaran yang bersifat mutlak atau absolut itu kemudian diberi interpretasi oleh para ulama dalam bidangnya masing-masing, sehingga lahirlah ajaran bentuk kedua, yaitu ajaran yang relatif atau nisbi. Sebagai hasil ijtihad, ajaran yang relatif atau nisbi ini boleh berubah dan dapat diubah.¹³

Salah satu penghambat dari upaya *rethinking* atau *reconstruction* adalah banyaknya jumlah ajaran yang dianggap mutlak atau absolut daripada ajaran yang relatif atau nisbi, sehingga sulit dibedakan mana ajaran yang benar-benar mutlak atau absolut dan mana ajaran yang sungguh-sungguh relatif atau nisbi. Padahal, sering terjadi yang pada esensinya ajaran tersebut adalah ajaran yang relatif atau nisbi, tetapi dipandang sebagai ajaran yang mutlak atau absolut.

¹³ Apa yang dianggap benar dan dapat berlaku di suatu masa menurut suatu ijtihad, bisa berubah tidak benar atau tidak berlaku lagi dalam hasil ijtihad masa kini.



Dalam pemikiran Islam, hanya ada empat ajaran yang mutlak atau absolut, yakni Tuhan itu ada dan Dia Maha Esa; Muhammad adalah Rasulullah; al-Qur'an adalah wahyu; dan hari akhirat pasti ada. Jadi, dalam koridor empat nilai fundamental itu pemikiran Islam dikembangkan seluas-luasnya untuk perumusan nilai-nilai instrumental dalam menghadapi tantangan zaman. Silahkan berpikir sebebaskan-bebasnya tentang apa saja asalkan tidak berkesimpulan bahwa Tuhan tidak ada, Muhammad bukan Rasul, al-Qur'an bukan wahyu, dan hari akhirat tidak ada.

Ketiga, membangun tumbuhnya kesadaran waktu di kalangan ummat. Kelemahan kesadaran waktu ini sering menimbulkan sikap ahistoris yang berakibat pada kegemaran bernostalgia terhadap kejayaan masa lampau, serta orientasi yang sangat kuat kepada kehidupan sesudah mati. Orientasi kepada kehidupan sesudah mati mengandung makna bahwa kegiatan hidup hanya mengacu kepada kehidupan kedua kelak di akhirat, sedangkan kehidupan "nanti" dalam arti ke masa depan di dunia ini tidaklah begitu penting. Karena itu, sikap hidup biar bersahaja saja di dunia ini, asal di akhirat hidup berbahagia, harus diganti dengan sikap hidup baru bahwa kebahagiaan hidup di akhirat sangat ditentukan oleh kesejahteraan di dunia. Kalau ingin bahagia di akhirat harus merebut kebahagiaan dunia.

Untuk itu, interpretasi terhadap rukun iman tentang *al-yaum al-akhir* (percaya kepada hari akhirat) perlu diperbaharui. *Al-yaum al-akhir* secara harfiah bermakna hari akhir. Hari akhir memang diisyaratkan mengacu kepada kehidupan kedua di akhirat sesudah manusia mengalami kematian. Tetapi, dalam konteks keduniaan, hari akhir adalah masa depan kita. Maka, perlu pengembangan pemahaman hari akhir dengan memasukkan makna kehidupan kedua dalam arti masa depan di dunia ini. Hal ini agaknya yang dimaksud Allah dalam surat al-Qashas (28) ayat 77 : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi"

Pemahaman di atas berkaitan erat dengan pemanfaatan waktu. Al-Qur'an memerintah manusia untuk memanfaatkan waktu tersebut semaksimal mungkin, bahkan dituntunnya manusia untuk mengisi seluruh waktunya dengan berbagai amal, mempergunakan semua daya yang dimilikinya.¹⁴ Siapa yang tidak mampu mengisi waktunya dengan optimal,

¹⁴Lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet. II, Mizan, Bandung, 1996, h. 553.



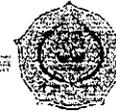
bersiap-siap ditinggalkan oleh waktu itu sendiri. Ia berlalu begitu cepat, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menahannya, walaupun sedetik. Karena waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala, melintasi pulau, kota, dan desa, membangkitkan semangat atau meninabobokkan manusia. Ia diam seribu bahasa, sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya, walaupun segala sesuatu, selain Tuhan, tidak akan mampu melepaskan diri darinya.¹⁵ Bahkan, Allah bersumpah dengan waktu bahwa manusia akan selalu mengalami kerugian, kecuali mereka yang mengisi waktu dengan amal saleh atas dasar iman kepada-Nya. Firman Allah dalam surat al-Ashr ayat 1-3 :
"Demi masa, manusia selalu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang saling memperingatkan tentang kebenaran dan saling memperingatkan tentang kesabaran".

Keempat, mencerahkan pemahaman tentang amal saleh. Selama ini, amal saleh dipahami dalam pengertian yang sangat sempit. Suatu pekerjaan baru dipandang sebagai amal saleh, jika pekerjaan itu berkaitan erat dengan orientasi keagamaan. Tetapi, jika pekerjaan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan ritual keagamaan atau tidak berorientasi secara formal dengan agama, maka tidak dipandang sebagai amal saleh.

Implikasi moral dan etis dari pemahaman kerja seperti itu adalah terlalu mudah seseorang melakukan tindak korupsi dan manipulasi dalam pekerjaan yang dia tahu bahwa pekerjaan itu bukan ritual keagamaan. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati untuk tidak melanggar nilai-nilai moral dan etis jika pekerjaan itu adalah ritual keagamaan.

Perbedaan yang tajam tentang makna kerja, mana yang berkaitan dengan ritual keagamaan dan mana yang tidak berkaitan dengan orientasi keagamaan, berpengaruh kuat terhadap konsep amal saleh dalam kesadaran ummat. Secara redaksional, pemahaman tersebut memunculkan umpamanya dalam pernyataan "mari kita berbuat amal". Yang dimaksud dengan pernyataan berbuat amal itu adalah melakukan pekerjaan seperti berderma, berinfaq, dan bersadaqah. Padahal dalam Islam, kata amal *an sich* adalah netral. Tetapi, masyarakat sudah memahaminya sebagai pekerjaan yang mengandung ritual keagamaan. Karena itu, sangat perlu dijelaskan bahwa konsep amal saleh bukan saja pekerjaan membangun masjid, mengumpulkan fitrah, membantu anak yatim piatu, dan membangun panti

¹⁵*Ibid.*, h. 546.



asuhan, tetapi pekerjaan membangun jembatan, membangun pasar swalayan, membangun jalan tol, juga bahagian dari amal saleh.

Penutup

Empat agenda yang termaktub dalam pokok pikiran terdahulu merupakan upaya dalam rangka *rethinking* atau *reconstruction*, yang dapat dilakukan dakwah Islam dalam perspektif pemikiran Islam. Tentu saja pokok-pokok pikiran tersebut tidaklah berpretensi akan mampu menyelesaikan semua permasalahan yang sedang dihadapi oleh ummat dan bangsa Indonesia sekarang ini secara *simultan*.

Namun, dalam posisinya sebagai upaya *rethinking* atau *reconstruction* tersebut, diharapkan hendaknya ia dapat memberikan daya dorong bagi perubahan ummat Islam. Jika hal tersebut terlaksana, maka tugas dakwah Islam dalam perspektif pemikiran Islam berarti sudah tergenapkan dengan baik.

A. KEPUSTAKAAN

Haikal, Muhammad Husein, *Hayatu Muhammad*, Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, Kairo, 1965.

Harun Nasution, *Islam Rasional*, Cet. I, Mizan, Bandung, 1995.

Hodgson, Marshal G.S., *The Ventur of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, The University of Chicago Press, 1974.

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. I, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992.

-----, "Memberdayakan Masyarakat Menuju Negeri yang Adil, Terbuka, dan Demokratis", Pidato Sambutan Peringatan Ulang Tahun Ke-10 Yayasan Wakaf Paramadina, November 1996.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet. II, Mizan, Bandung, 1996.

Sukarja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Cet. I, UI-Press, Jakarta, 1995.

Riwayat Hidup: Ariendonika

Lektor Kepala dalam mata kuliah Pemikiran Islam.Lahir di Tarusan Tilatang Kamang Bukittinggi, Alumni Fakultas Dakwah IAIN IB Padang, Menyelesaikan Magister di PAscasarjana IAIN Sultan Alauddin Ujung Pandang, dan Doktor Pemikiran Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Waktu tulisan ini ditulis, sedang menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian STAIN Palu.